



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) ASOSIASI
MEKARSARI KELURAHAN KANDRI KECAMATAN
GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

AYUNI LATHIFAH

1201414066

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

FAKULTAS ILMUPENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disetujui skripsi dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" untuk diajukan di sidang panitia ujian skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Semarang, Mei 2019

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Tri Suminar, M.Pd
NIP.196705261995122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah



Dr. Utsman, M.Pd
NIP195708041981031006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" disusun oleh:

Nama : Ayuni Lathifah

NIM : 1201414066

telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Mei 2019

Pantita Ujian



Dr. Sungkoro Edy Mulyono, S.Pd, M.Si
NIP. 196807042005011001

Sekretaris

Dr. Utsman, M.Pd
NIP195708041981031006

Penguji I

Dr. Amin Yusuf, M.Si.
NIP. 196408081991031003

Penguji II

Dr. Emmy Budiartati, M.Pd
NIP. 195601071986012001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Tri Suminar, M.Pd
NIP.196705261995122001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Mei 2019



Ayuni Lathifah

1201414066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. *“Impian haruslah menyala dengan apapun yang kita miliki, meskipun yang kita miliki tidak sempurna, meskipun itu retak- retak.” (Iwan Setiawan)*
2. *“Dan Bersabarlah Kamu Bersama-Sama Dengan Orang-Orang Yang Menyeru Tuhannya Di Pagi Dan Senja Hari Dengan Mengharap Keridhaan-Nya” (Qs AL-Kahf : 28)*

PERSEMBAHAN:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Subandi dan Ibu Ana, Kakak Annisa. yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, semangat dan dukungan.
2. Alyen Yulianti yang ikhlas meminjamkan laptop selama setahun lamanya untuk skripsi ini.
3. Kak Nana yang senantiasa menemani selama proses revisian.
4. Teman-temanku Agung, Umir, Alfi, Nia Mei, Fida yang turut serta ikut membantu dalam penelitian hingga pada saat sidang.
5. Teman 45 hariku Nessa dan Desy yang selalu menghiburku.
6. Teman-teman PLS Rombel 2 angkatan 2014.
7. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt yang senantiasa melimpahkan rizki, rahmat dan hidayah, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi penyelesaian studi Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. Achmad Rifa’i, RC, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian sehingga dapat melakukan penelitian ini dengan lancar.
2. Dr. Utsman, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin penelitian dan memotivasi serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
3. Dr. Tri Suminar, M.Pd., Dosen pembimbing yang sabarmemberikan bimbingan, pengarahan, masukan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Agus Muryanto, SH., Kepala Kelurahan Kandri beserta perangkatnya yang memberikan ijin penelitian.

5. Bapak Masduki, Ketua UMKM Asosiasi Mekarsari yang memberikan informasi dengan baik serta sabar dalam membantu selama proses penelitian.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak telah membantu tersusunnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan.

Semarang, Mei 2019

Penulis,

Ayuni Lathifah

1201414066

ABSTRAK

Lathifah, ayuni. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Tri Suminar, M.Pd

Kata Kunci : *Pemberdayaan Masyarakat, UMKM Asosiasi Mekarsari*

Pemberdayaan adalah suatu proses belajar untuk mencapai kemandirian. Melalui proses belajar maka masyarakat akan memperoleh kemampuan dan mencapai kemandirian secara bertahap sebagai bekal agar menjadi masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif dan memiliki keterampilan agar mereka lebih mandiri, meningkatnya kesejahteraan dan penghasilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan melalui UMKM dan untuk mendeskripsikan faktor yang mendorong dan menghambat pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kelurahan Kandri RW 01. Tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 anggota kelompok UMKM, 1 ketua UMKM, 1 pengurus UMKM. Tehnik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan metode. Analisis data dengan model interaktif dengan langkah-langkah : (1) Reduksi data, (2) display data, (3) Verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara bertahap yaitu persiapan, pengkajian, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. faktor pendorong pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya dukungan pemerintah berupa program-program pelatihan beserta narasumber, dan tingginya motivasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai teknik pemasaran *online* serta pemasarannya yang belum berkembang secara meluas.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta kegiatan ini dapat menambah wawasan dan keterampilan dalam pemasaran secara online bagi anggota UMKM Asosiasi Mekarsari. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor penghambat yang meliputi ilmu pengetahuan, karena ada beberapa warga yang masih gagap teknologi untuk mengetahui tentang sistem berwirausaha modern yang lebih mudah dan efisien, produk-produk hasil olahan dari UMKM Asosiasi Mekarsari seperti snack, keripik dll pemasarannya masih dalam lingkup kawasan Kandri yang terbilang lesu dan sepi. Saran penelitian ini adalah Asosiasi Mekarsari seharusnya lebih aktif dan kreatif dalam membuat program-program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM agar anggota UMKM tetap semangat dalam menjalankan usahanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBARxii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	.xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Penegasan Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pemberdayaan Masyarakat	11
2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	11
2.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	17
2.1.3 Sasaran Pemberdayaan Masyarakat	20

2.1.4	Strategi Pemberdayaan Masyarakat	21
2.1.5	Model Pemberdayaan Masyarakat	23
2.1.6	Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	24
2.1.7	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	28
2.1.8	Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	34
2.1.9	Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	35
2.2	UMKM.....	36
2.2.1	Pengertian UMKM.....	36
2.2.2	Kriteria UMKM.....	39
2.2.3	Karakteristik UMKM	40
2.2.4	Peranan dan Kontribusi UMKM	42
2.3	Kerangka Berpikir	43
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Pendekatan Penelitian	46
3.2	Lokasi Penelitian	47
3.3	Fokus Penelitian	48
3.4	Subjek Penelitian	49
3.5	Sumber Data	50
3.6	Teknik Pengambilan Data	51
3.7	Teknik Keabsahan Data	58
3.8	Teknik Analisa Data	62
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran umum.....	65
4.2	Gambaran umum subjek penelitian..	72

4.3 Hasil Penelitian	73
4.4 Pembahasan	99
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	118
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN – LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	73
Table 3. Sarana Dan Prasaranan UMKM Asosiasi Mekarsari.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir	52
Gambar 2. Skema Triangulasi Sumber	67
Gambar 3. Skema Triangulasi Metode	67
Gambar 4, Komponen Analisis Data.....	71
Gambar 5. Struktur Organisasi UMKM Asosiasi Mekarsari	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kisi-Kisi Pedoman Wawancara	135
Lampiran 2 : Pedoman Observasi.....	137
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara	140
Lampiran 4 : Hasil Wawancara	145
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian	186
Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian.....	187
Lampiran 7 : Daftar Nama Pengurus UMKM Asosiasi Mekarsari	187
Lampiran 8 : Pedoman Dokumentasi	188
Lampiran 9 : Catatan Lapangan.....	189
Lampiran10 : Dokumentasi Gambar.....	197

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada (Sucipto dan Sutarto, 2015: 136). Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Wuryani dan Wahyu (2012: 149) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan bentuk dari proses perubahan sosial menuju ke arah masyarakat yang hidup lebih baik dan sejahtera. Salah satu ciri utama dari pemberdayaan adalah menitikberatkan pada

peran dan partisipasi masyarakat sejak dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemerintah dan instansi lain mempunyai tugas sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.

Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan (Sutarto,2007: 153).

Dalam jurnal internasional pemberdayaan masyarakat adalah:

“Community empowerment is a term describing a participative and developmental approach to local decision making, “through which marginalized or oppressed community members and groups acquire valued resources and basic rights, and achieve greater control over their lives and environment”(Yulong and Caroline, 2015: 249).

Diartikan sebagai berikut: Pemberdayaan masyarakat menggambarkan pendekatan partisipatif dan pengembangan pengambilan keputusan lokal, “di mana anggota dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau tertindas memperoleh sumber daya dan hak-hak dasar yang berharga, dan mencapai kontrol yang lebih besar atas kehidupan dan lingkungan mereka” (Yulong and Caroline, 2015: 249).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan berhak memperoleh sumber daya dan hak dasar yang berharga, guna meningkatkan taraf hidupnya menjadi yang lebih baik.

Salah satu pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah (UMKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian UMKM dapat dipandang sebagai aset nasional dan juga aset yang paling potensial bagi daerah, oleh sebab itu pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud pemerataan pembangunan. Pemberdayaan UMKM bukan hanya menargetkan pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan bagian dari program program pembangunan daerah yang idealnya harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. (Fatimah, 2011: 52).

Suatu usaha bisa di katakan berkembang baik jika proses usahanya berjalan dengan lancar dengan memaksimalkan pekerja dalam suatu produktifitas yang di jalannya. Selain itu usaha kecil menengah juga perlu adanya strategi agar dapat mencapai suatu sasaran sehingga dengan itu semua akan terkontrol dengan baik. Dengan menggunakan strategi maka suatu Badan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) akan dapat berkembang sesuai dengan harapan. Pengembangan organisasi

adalah usaha terencana dikaitkan dengan peningkatan kreatifitas, ketrampilan, menyelesaikan masalah, pembelajaran dan perkembangan manusia dalam organisasi. Selain itu juga dapat mengubah tujuan dan strategi, teknologi, desain jabatan, struktur, proses dan orang - orangnya.

Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah memiliki warisan budaya lokal yang berpotensi bagus untuk dikembangkan. Salah satunya di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati, secara umum Kelurahan Kandri memiliki luas wilayah 245,490 Ha yang terdiri dari 26 RT yang tersebar didalam 4 RW. Pada tahun 2012, tercatat jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Kandri sebesar 3.797 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebesar 1.507 dan jumlah penduduk miskin sebanyak 876 orang.

Kelurahan Kandri sejak tahun 2012 diresmikan menjadi desa wisata oleh pemerintah Kota Semarang dimana banyak sekali program-program berbasis pemberdayaan masyarakat untuk bisa memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dianggap penting mengingat mata pencaharian penduduk Kandri yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, kemudian akan beralih fungsi sebagai pelaku usaha dalam bidang pariwisata. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan haruslah berjalan secara maksimal guna mencapai tujuan dari ditetapkannya kebijakan tersebut. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah “Asosiasi Mekarsari” Kelurahan Kandri.

Asosiasi Mekarsari adalah sebuah wadah untuk kreatifitas warga Kandri di bidang olahan pangan maupun kerajinan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok, yang berujung pada kesinambungan dan kemandirian ekonomi. Melalui asosiasi ini diharapkan dapat menjadi kelompok usaha yang berorientasi pasar, berdaya saing dan berperan sebagai elemen pelaku ekonomi lokal.

Asosiasi ini berbentuk UMKM yang mewadahi ibu-ibu rumah tangga yang membuat berbagai olahan makanan berbasis hasil pertanian, kerajinan dari limbah pertanian dan batik dengan ciri khas Desa Kandri. Selain mempunyai keunikan tersendiri asosiasi ini juga mempunyai antusias untuk merintis, membangun, bahkan memajukan kelompoknya. UMKM Asosiasi Mekarsari mempunyai banyak produk unggulan antara lain: Omah pohong, Deva kriuk, Puji Wijaya, Yu Ginuk, The Ind, Kandrito, Kandri Etnic, Batik Siwarak dan banyak lagi lainnya. Peneliti beranggapan bahwa UMKM Asosiasi Mekarsari mempunyai beberapa alasan yang tepat untuk menjadi tempat penelitian.

Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi industri kecil, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam sangat mempengaruhi Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Asosiasi Mekarsari ini sendiri walaupun sudah memiliki beberapa produk unggulan tetapi masih kurang memiliki ciri khas lokal yang kuat terbentuk melalui produk-produk UMKM kreatif mereka. Hal ini mengakibatkan Asosiasi Mekarsari mengalami ketertinggalan dengan UMKM lain yang mempunyai ciri khas kuat seperti Solo, Pekalongan, maupun Jepara dalam

koridor apresiasi terhadap kearifan budaya lokal. Daerah-daerah tersebut telah mengkomodifikasi dan menunjang sisi unik produk lokalnya, sehingga masyarakat umum mengenal produk yang berfrase dengan asal daerah mereka, seperti Batik Solo, Batik Pekalongan, dan Ukiran Jepara.

Permasalahan UMKM berbasis ekonomi kreatif pada umumnya terletak pada sumber daya manusia, modal, dan penguasaan teknologi modern. Gambaran kondisi iklim usaha UMKM Asosiasi Mekarsari di Kelurahan Kandri pada saat ini, dilihat dari peluang pemberdayaan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dan dari sektor ke sektor belum mengindikasikan besarnya harapan pada kelompok usaha tersebut untuk mendukung tumbuhnya sistem perekonomian masyarakat setempat. Hal ini juga mengakibatkan UMKM Asosiasi Mekarsari belum mampu memberikan suatu corak khusus untuk pengembangan desa wisata Kandri.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pengembangan UMKM Asosiasi Mekarsari perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah atau dinas terkait maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UMKM memiliki peranan yang penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah.

UMKM Asosiasi Mekarsari dipilih dalam penelitian ini karena diharapkan mampu mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dengan berbekal pada ilmu

pengetahuan, kreatifitas, serta inovasi juga mengembangkan lapangan pekerjaan. Sehingga UMKM Asosiasi Mekarsari diharapkan mampu mengangkat perekonomian Desa wisata Kandri dan memberikan image positif tentang ciri khas budaya lokal Kelurahan ini. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
- 1.2.2 Bagaimana faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
- 1.2.3 Bagaimana faktor pendukung pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada, dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- 1.3.2 Mendeskripsikan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- 1.3.3 Mendeskripsikan faktor pendukung pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan luar sekolah

khususnya tentang teori pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pengelola UMKM untuk membuat kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan UMKM Asosiasi Mekarsari serta bahan pertimbangan dan acuan dalam membuat program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya persimpangan dan perluasan masalah dalam penelitian ini serta untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti memberikan batasan-batasan dalam pembahasannya yakni:

1.5.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Buah dari pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen merupakan *human assets* yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri.

1.5.2 UMKM

UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari akar kata *empower*, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana “daya” bermakna kekuatan (*power*) atau kemampuan. Menurut Sulistiyani (2004: 77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai: Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.

Dalam jurnal internasional pemberdayaan adalah:

“The concept of empowerment has been developed and employed in a wide array of definitions in social-science research. Friedmann (1992) in Zimmerman (1995) distinguishes between empowering process and empowered outcomes. The first refers to how people, organizations, and communities become empowered, and the latter refers to the consequences of those processes. The concept of empowerment is applicable for those who lack power of those whose potential is not fully developed in improving the quality-of-life, including urban poor. This concept encourages the poor to reacquire the power and control over their own lives.

Dapat diartikan sebagai berikut: konsep pemberdayaan telah dikembangkan dan digunakan dalam berbagai definisi dalam penelitian sosial sains. Friedmann (1992) dalam Zimmerman (1995) membedakan antara proses pemberdayaan dan hasil diberdayakan. Pertama merujuk kepada bagaimana orang-orang, organisasi, dan masyarakat menjadi berdaya, dan yang terakhir mengacu pada konsekuensi dari proses-proses tersebut. Konsep pemberdayaan berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau mereka yang potensial belum sepenuhnya dikembangkan dalam meningkatkan kualitas dalam kehidupan, termasuk perkotaan yang miskin. Konsep ini mendorong masyarakat untuk kekuasaan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012: 27) mengartikan pemberdayaan yaitu: Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll)

yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Sulistiyani (2004: 79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Rusmiyati (2011: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003: 43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan dapat didefinisikan setiap orang memperoleh pemahaman dan pengendalian kekuatan sosial, ekonomi, dan/atau politik untuk memperbaiki keberadaannya di masyarakat. Pemberdayaan itu terjadi melalui beberapa tahap. Pertama, setiap orang mengembangkan kesadaran awal sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kehidupannya dan memperoleh pelbagai keterampilan yang memungkinkan mereka melaksanakannya. Kedua, melalui pengambilan tindakan, mereka mengalami keberdayaan dan kepercayaan dirinya meningkat. Ketiga, karena adanya pertumbuhan keterampilan dan kepercayaan, setiap orang bekerjasama berusaha mempengaruhi keputusan dan sumberdaya yang mengakibatkan kesejahteraannya (Rifa'i, 2008:40).

Prijono dan Pranarka (1996: 88) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Secara konseptual menurut Saraswati dalam Alfitri (2011: 24) pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut: (a) *Learning by doing*. Artinya, pemberdayaan

adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-menerus, dampaknya dapat terlihat; (b) *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat; (c) *Self evaluation*. pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri; (d) *Self development and coordination*. Artinya menodorong agar mampu melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas; (e) *Self selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan; (f) *Self decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses menggelinding dengan sendirinya.

Salah satu komponen yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan suatu program adalah proses. Melalui proses yang tepat diharapkan sebuah program dapat berjalan dengan lancar dan sistematis sehingga pencapaian tujuan dapat tercapai efektif dan efisien.

Hal ini senada dalam junal Internasional bahwa:

“Empowerment is a management pratice of sharing information, rewards, and power with employees so that they can take initiative and make decisions to solve problems and improve service and perfomance. Empowerment is based on the idea that giving employees skills, resources, authority, opportunity, motivation, as well holding them responsible and accountable for outcomes of

their actions, will contribute to their competence and satisfaction. Empowerment means ensuring that individuals have the capacity and opportunity to equip themselves with the skills and knowledge necessary to make informed life choices (Kumar, 2017: 59) ”.

Dapat diartikan sebagai berikut: pemberdayaan adalah praktek proses berbagai informasi, imbalan, dan kekuasaan dengan karyawan sehingga mereka dapat mengambil inisiatif dan membuat keputusan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan pelayanan dan kinerja. Pemberdayaan didasarkan pada gagasan bahwa pemberian keterampilan karyawan, sumber daya, otoritas, peluang, motivasi, serta menahan mereka bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan mereka, akan memberikan kontribusi untuk kompetensi dan kepuasan mereka. Pemberdayaan berarti memastikan bahwa individu memiliki kapasitas dan kesempatan untuk membuat pilihan hidup (Kumar, 2017: 59).

Adamson (2010: 118) dalam jurnal internasional juga menjelaskan bahwa:

“In the JRF study a concept of empowerment was derived from consideration of Steven Lukes’ (1974) model of power. For empowerment to have occurred an ability to influence all three ‘faces of power’ ” identified by Lukes must be evident. A simple ability to make decisions, a role in influencing the overall regeneration agenda and an ability for community views to change the ideological assumptions of regeneration professionals would need to be evident.”

Yang artinya adalah dalam studi JRF, konsep pemberdayaan berasal dari pertimbangan model kekuasaan Steven Lukes (1974). Untuk pemberdayaan telah terjadi kemampuan untuk mempengaruhi ketiga ”wajah kekuasaan ” yang diidentifikasi oleh Lukes harus jelas. Kemampuan yang sederhana untuk membuat

keputusan, peran dalam mempengaruhi agenda regenerasi secara keseluruhan dan kemampuan untuk pandangan masyarakat untuk mengubah asumsi ideologis dari para profesional regenerasi perlu dibuktikan.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya. Bisa diasumsikan tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa daya tersebut belum dapat diketahui. Masyarakat kurang berdaya perlu dibimbing melewati serangkaian proses secara bertahap dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia di lingkungan sekitarnya, agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu untuk mengelola potensi tersebut, sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat itu sendiri.

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu mengembangkan dari masyarakat yang lemah, renta, miskin, marjinal, dan kelompok perempuan yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dengan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu atau kelompok menjadi mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian

berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. (Sulistiyani, 2004:79-80).

Berdasar UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa “Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantumasyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne dalam Huraerah, 2011: 99). Sehingga pemberdayaan memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

Sementara itu, dalam jurnal internasional Tomey (2009: 181-182) menyebutkan bahwa:

“In community development practice, practitioners and organizations play many different roles in the planning, implementation and diffusion of the ideas and projects that they seek to promote. These roles are direct products of multiple and often conflicting forces. the goals of the intervening institution, the needs of the community, the vested interests of state and local governments and business groups, and even the personal aspirations of the individual practitioner. While some of these roles are developed in conjunction with the members of the community to be ‘developed’, all too often the act of defining such roles is undertaken by an institution or organization that resides outside of the boundaries (whether spatial or symbolic) of the specified community. In turn, these roles are greatly influenced by the constantly evolving moods and shifts of development theory and practice of the day, lined with buzzwords that often have little to do with the overall goal of community development.”

Pernyataan Tomey tersebut berarti dalam praktik pengembangan masyarakat, praktisi dan organisasi memainkan banyak peran berbeda dalam perencanaan, implementasi, dan penyebaran gagasan dan proyek yang ingin mereka promosikan. Peran-peran ini adalah produk langsung dari banyak kekuatan dan sering bertentangan. tujuan dari lembaga intervensi, kebutuhan masyarakat, kepentingan negara dan pemerintah lokal dan kelompok bisnis, dan bahkan aspirasi pribadi dari praktisi individu. Sementara beberapa peran ini dikembangkan bersama dengan anggota masyarakat untuk 'dikembangkan', terlalu sering tindakan mendefinisikan peran tersebut dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang berada di luar batas (baik spasial maupun simbol) dari komunitas yang ditentukan. Pada gilirannya, peran-peran ini sangat dipengaruhi oleh suasana hati yang terus berubah dan pergeseran teori dan

praktik pembangunan hari itu, dipenuhi dengan kata-kata yang sering tidak ada hubungannya dengan keseluruhan tujuan pengembangan masyarakat.

Jadi kesimpulannya bahwa tujuan pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen yang bias di kelola untuk dikembangkan semua itu merupakan *human assets* yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pemberdayaan.

2.1.3 Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan di berdayakan, menurut Schumacer dalam Sulistiyani(2004: 90), memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya sering dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras.

Menurut Sumaryadi (2005: 115) Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian yaitu sebagai berikut : a) terbuka kesadaran dan tumbuh peran aktif, mampu mengorganisir dan kemandirian bersama, b) memperbaiki

keadaan sosial kehidupan kaum lemah, tak berdaya, dengan meningkatkan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha- usaha kecil di berbagai bidang ekonomi kearah swadaya, c) meningkatkan kemampuan kinerja kelompok- kelompok swadaya dalam ketrampilan teknis dan manajemen untuk memperbaiki produktifitas dan pendapatan mereka.

2.1.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Desmawati (2015: 85) dalam jurnal menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat menurut FGD, wawancara mendalam dengan *keyperson*, berdasarkan hasil penelitian didapatkan tiga strategi pemberdayaan masyarakat. adapun ketiga strategi pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.4.1 Supply lebih kecil dari demand

Strategi supply lebih kecil dari demand ini adalah memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kepada masyarakat miskin dan menganggur untuk diberi ketrampilan yang dimulai dari dasar (ketrampilan dasar) karena masyarakat (warga belajar) benar-benar belum memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan pasar.

2.1.4.2 Supply sama dengan demand

Strategi supply sama dengan demand ini adalah pelatihan diberikan kepada warga belajar terutama untuk menumbuhkembangkan skill kewirausahaan karena warga belajar telah memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar.

2.1.4.3 Supply tidak sama dengan atau lebih tinggi demand

Pelatihan ini diberikan kepada warga belajar terutama untuk memfasilitasi peningkatan usaha atau memfasilitasi pencarian alternatif pengembangan karena warga belajar telah memiliki ketrampilan tidak sama atau lebih tinggi dengan kebutuhan pasar.

Hasil jurnal penelitian dari Mulyono (2017: 8), diperoleh tiga formulasi strategi pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang yaitu pertama apabila *supply* lebih kecil dari *demand*, strategi ini difokuskan dari pelatihan dasar sampai warga belajar mampu usaha mandiri atau bekerja, kedua *supply* sama dengan *demand*, strategi ini difokuskan pada *skill* kewirausahaan, dan strategi yang ketiga apabila *supply* tidak sama dengan atau lebih tinggi dari *demand*, strategi ini difokuskan pada fasilitasi usaha atau fasilitasi pencarian alternatif pengembangan. Model strategi pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kinerja agen pembaharu dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Morris dan Binstock (1966) dalam Nasdian (2014:60) memperkenalkan tiga strategi perencanaan dan aksi pengembangan masyarakat. perencanaan dan aksi untuk perubahan tersebut dilaksanakan melalui: (1) Modifikasi pola sikap dan perilaku dengan pendidikan dan aksi lainnya; (2) Mengubah kondisi sosial dengan mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal; atau (3) Reformasi peraturan dan system fungsional suatu masyarakat.

Suharto dalam Huraerah (2011: 106) konteks pekerjaan pemberdayan dapat dilakukan melalui tiga cara: (1) Aras Mikro, yaitu pemberdayaan dilakukan kepada

klien secara individu melalui bimbingan konseling, *stress managemen*, *crisis intervention*. Tujuan utama adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. (2) Aras Mezzo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap kelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi. (3) Aras Makro, yaitu disebut juga pendekatan sebagai strategi system besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, dengan tujuan memandang klien yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.1.5 Model Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Rifa'i (2008:144), adanya model-model pemberdayaan masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut; (a) Struktur kelompok kecil, dapat terdiri atas kesamaan usia atau keragaman usia warga belajar dan dapat dibentuk dari kelompok yang telah ada atau kelompok baru. (b) Alih tanggungjawab, mensyaratkan kecukupan waktu dan kesempatan warga untuk memiliki program. (c) Kepemimpinan partisipan, biasanya harus dipelajari karena warga belajar telah terkondidi untuk menjadi pasif disekolah. (d) Agen sebagai fasilitator, bukan saja mensyaratkan

pelatihan, melainkan juga seleksi yang benar. (e) Proses dan hubungan demokratis dan non hirarkhial beragam dari praktik pendidikan nonformal, dan karena itu diperlukan dukungan yang dapat diterima oleh semua organisasi. (f) Integrasi refleksi dan aksi, dapat didorong melalui proses belajar dari pengalaman, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan actual di dalam kehidupan warga belajar. (g) Metode yang dapat meningkatkan kesadaran diri sangat efektif dipresentasikan oleh rancangan program sementara dibandingkan dengan rancangan program yang direncanakan sebelumnya. (h) Perbaikan keberadaan sosial, ekonomi, dan atau politik merupakan tujuan jangka Panjang dari pemberdayaan.

Menurut Fakhruddin dkk, (2010: 17-19), beberapa cara pandang mengenai model pemberdayaan adalah sebagai berikut; (a) Pemberdayaan dimaknai dalam konteks penempatan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung dalam pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara mandiri, (b) Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak orang beragumen bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis seperti demokrasi, desentralisasi, good gavernance, otonomi daerah, masyarakat sipil dan selanjutnya. (c) Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan, (d) Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal sampai ke level structural masyarakat secara kolektif.

2.1.6 Prinsip- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2012: 105) menyatakan bahwa : “ *Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten*”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok dan Poerwoko (2012: 105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Mardikanto (2017:106) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain yang mencakup: 1) Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. mengenai hal ini harus dikaji secara mendalam, apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumber daya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu. 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampumelibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan. 3) Keragaman budaya, artinya perbedaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan

pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. 7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang sesuatu yang ia kerjakan. 8) Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penggunaan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi. 9) Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasan sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinannya. 10) Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. 11) Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. 12) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

Selain yang telah diungkapkan sebelumnya, Karsidi (1988) dalam Karsidi (2007: 5-6) juga mengungkapkan bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

2.1.6.1 Belajar dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sendiri.

2.1.6.2 Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

2.1.6.3 Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah.

2.1.7 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004: 83), bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut Sulistiyani (2004: 83), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi : 1) Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan prilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/

aktor/ pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan akan dapat menghantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-kerampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini seingkali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitatornya saja.

Dalam proses pemberdayaan, ada tujuh tahapan yang seharusnya dilewati dalam program pemberdayaan masyarakat. Proses tahapan pemberdayaan menurut Adi (2002: 182-196) adalah sebagai berikut:

2.1.7.1 Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahap yang harus dikerjakan, yaitu penyiapan petugas (tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*) dan penyempurnaan lapangan merupakan prasyarat suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2.1.7.2 Tahap Pengkajian (Assesment)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilihat secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat (*key-personal*) tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini petugas sebagai agen perubah berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber

daya yang dimiliki klien. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk melakukan assesment. Baik itu dengan pendekatan yang kuantitatif maupun kualitatif.

2.1.7.3 Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan (*agen of change*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

2.1.7.4 Tahap Performalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

2.1.7.5 Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan apabila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Pertentangan antar kelompok warga juga dapat menghambat pelaksanaan suatu program kegiatan.

2.1.7.6 Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

2.1.7.7 Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi lebih karena proyek sudah harus diberhentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat atau mau meneruskan. Meskipun demikian, petugas harus tetap keluar dari komunitas secara perlahan-lahan dan bukan secara mendadak. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan secara sepihak dan tanpa disiapkan oleh petugas. Karena itu, bila petugas merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik jarang petugas tetap melakukan kontrak meskipun tidak secara rutin, dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Menurut Suparjan dan Hempri (2003:44), dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain: 1) Meningkatkan

kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. 2) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut. 3) Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial, tetapi juga berkaitan dengan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. 4) Pemberdayaan juga perlu mengkaitkan dengan pembangunan sosial dan budaya masyarakat.

Dapat disimpulkan tahap-tahap pemberdayaan dimulai dari membantu mengelompokkan kebutuhan masyarakat, penyadaran akan kebutuhan kesejahteraan hidup, dan pemberian fasilitas serta motivasi atau dukungan kepada masyarakat agar menuju masyarakat yang mempunyai kesadaran akan posisi dalam struktur sosial politik, mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi, meningkatkan kapasitas dalam pembangunan sosial dan budaya sehingga terciptalah masyarakat yang berdaya.

2.1.8 Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Suharto, 2009: 67).

- 2.1.8.1 Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2.1.8.2 Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 2.1.8.3 Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis deskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 2.1.8.4 Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 2.1.8.5 Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.1.9 Metode Pemberdayaan

Meurut Maharani (2012: 3) kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kesatuan proses yang berkelanjutan melalui kegiatan “kaji tindak yang partisipatif” atau dikenal sebagai *Participatory Action Research/ PAR*. Pengertian PAR bukanlah sebuah ‘proyek’ yang melibatkan partisipasi masyarakat, melainkan lebih bernuansa filosofis untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri dan bagi kepentingan peningkatan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan potensi yang mereka miliki sendiri, melalui kegiatan aksi dan refleksi yang berkelanjutan.

2.2 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

2.2.1 Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- 2.2.1.1 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2.2.1.2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 2.2.1.3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2.2.1.4 Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.2.1.5 Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pengertian UMKM menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi lain mengenai UMKM juga dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dimana BPS membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga (IKRT). BPS mengklasifikasi industry berdasarkan jumlah pekerjaannya, yaitu (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dimana usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta. Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar.

2.2.2 Kriteria UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

2.2.2.1.1 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2.2.2.1.2 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2.2.2.2 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

2.2.2.2.1 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2.2.2.2.2 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2.2.2.3 Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

2.2.2.3.1 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2.2.2.3.2 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

2.2.3 Karakteristik UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. *Pertama*, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. *Kedua*, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. *Ketiga*, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. *Keempat*, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. (Sulistiyastuti, 2004: 145)

Partomo (2004: 13) Kriteria umum usaha kecil dan menengah dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:

2.2.3.1 Struktur organisasi yang sangat sederhana

2.2.3.2 Tanpa staf yang berlebihan

2.2.3.3 Pembagian kerja yang “kendor”

2.2.3.4 Memiliki hirarki manajerial yang pendek

2.2.3.5 Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan

2.2.3.6 Kurang membedakan aset pribadi dan aset perusahaan

Menurut Tulus T.H (2009: 6-10) Tambunan dalam bukunya menjelaskan tentang karakteristik UMKM, yaitu sebagai berikut: 1) Sebagian besar UMKM yang ada, tidak berbadan hukum. 2) Lebih dari sepertiga pengusaha UMKM berusia diatas 45 tahun dan hanya sekitar 5,25% pengusaha UMKM yang berumur yang berumur dibawah 25 tahun. 3) Sebagian besar pengusaha UMKM mengungkapkan alasan kegiatan usaha yang dilakukan adalah latar belakang ekonomi. 4) Banyak melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja. 5) Tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi.

Karakteristik UMKM menurut Sudarno (2011: 139) *Pertama*, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. *Kedua*, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. *Ketiga*, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. *Keempat*, dilihat menurut golongan industri tampak

bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC31), diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga (ISIC33) masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas (34) dan kimia (35) relatif masih sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 1%.

Dari berbagai karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik UMKM pada dasarnya memiliki tenaga kerja secukupnya dan tergolong dari keluarganya sendiri, sebagian besar tidak berbadan hukum, memiliki manajerial yang sederhana, pelaku usaha tidak memiliki pendidikan yang tinggi, menggunakan teknologi yang sesuai kebutuhan atau sederhana, menggunakan modal yang tergolong kecil dan berasal dari dana pribadi.

2.2.4 Peranan dan Kontribusi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia.

2.2.4.1 Peranan UMKM di Bidang Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Rahmana (2009) menambahkan UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (*garment*), barang-barang kerajinan termasuk *meubel* dan pelayanan bagi turis.

2.2.4.2 Peranan UMKM di Bidang Sosial

Sulistiyastuti (2004: 148) berpendapat bahwa UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial

dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan alur atau arah berpikir yang hendak disampaikan oleh peneliti terhadap pembaca. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari di Kelurahan Kandri yang meliputi proses pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendukung pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari.

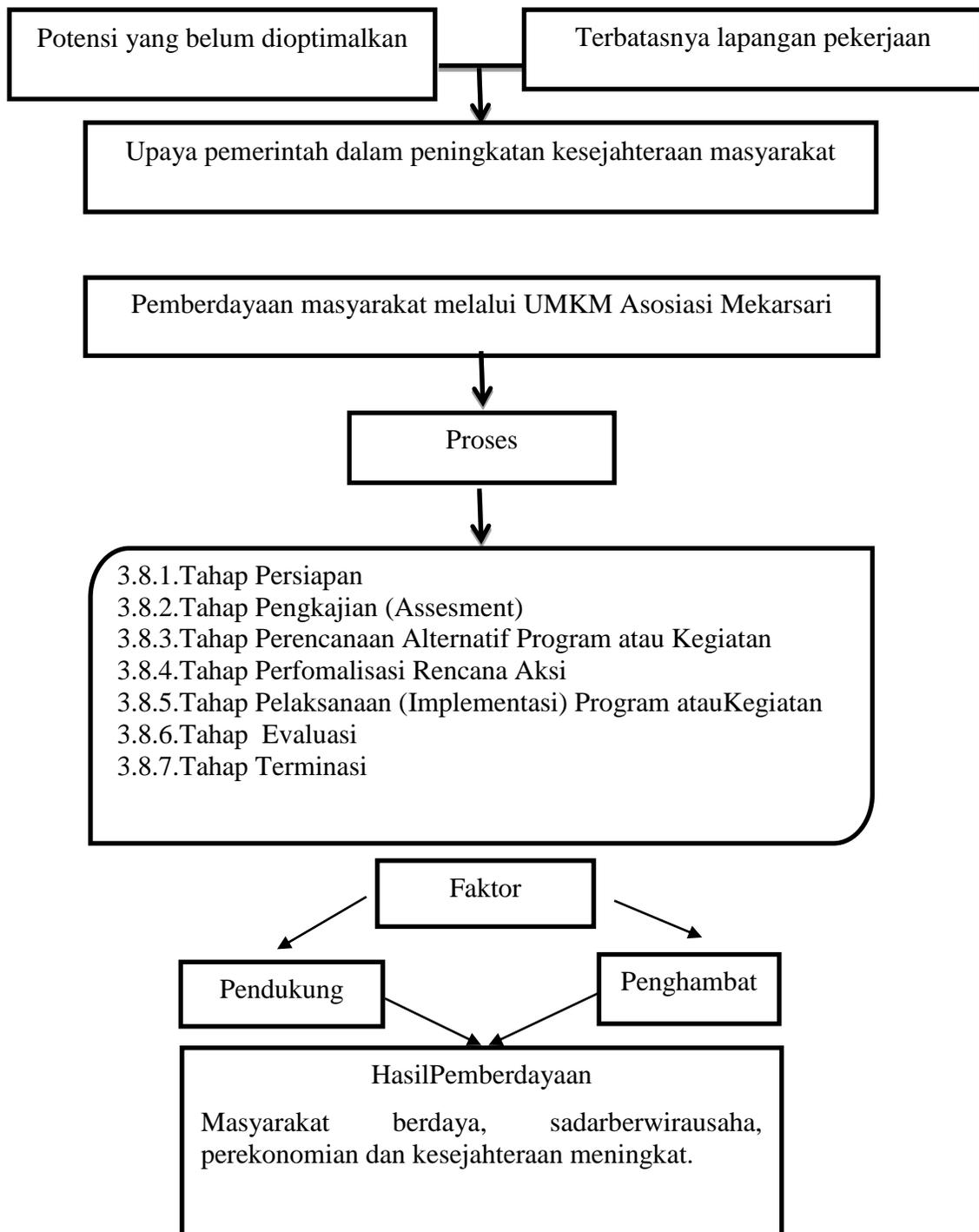
Masyarakat Kelurahan Kandri sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup masih belum bisa dikatakan berkecukupan. Pada tahun 2012 pemerintah Kota Semarang meresmikan Kelurahan Kandri menjadi desa wisata guna dapat memberdayakan masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata yang menyangkut masa depannya. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang berdaya maka dibuat UMKM Asosiasi Mekarsari berbentuk koperasi yang mawadahi masyarakat yang membuat berbagai olahan makanan berbasis hasil pertanian dan kerajinan dari limbah pertanian dan batik untuk bisa dikembangkan melalui proses pemberdayaan. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut harus melalui tahapan – tahapan

proses pemberdayaan yang nantinya dapat dilihat bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal unggulan melalui UMKM Asosiasi Mekarsari. Dari hasil pemberdayaan itu nantinya dilihat evaluasinya untuk perbaikan dimasa yang akan datang, sehingga UMKM Asosiasi Mekarsari jauh lebih maju dan berkembang.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari, dilakukan kajian mengenai proses pemberdayaan dan sejauh mana UMKM ini mampu membawa masyarakat pada tahapan tertentu dalam pemberdayaan.

Untuk memahami kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka dibuatlah bagan seperti berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari di Kelurahan Kandri melalui beberapa tahapan yang sudah dijalankan oleh Asosiasi Mekarsari, maka dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1 Usaha Mikro Kecil Menengah Asosiasi Mekarsari

Tujuan diadakannya program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari yaitu adalah agar warga melek berwirausaha dan memanfaatkan potensi desa yang ada agar dapat diolah menjadi barang bernilai jual sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga, serta mendukung program Pokdarwis Pandanaran sehingga dapat memajukan ekonomi warga sekaligus memajukan Desa wisata Kandri.

Masyarakat Kandri yang tergabung dalam keanggotaan UMKM Asosiasi Mekarsari berjumlah 44 anggota. Produk yang dihasilkan oleh UMKM Asosiasi Mekarsari mayoritas berupa produk olahan pangan yaitu antara lain keripik, getuk, jajanan pasar yang sebagian besar berbahan baku dari hasil pertanian Kandri sendiri salah satunya singkong. Ada juga produk batik dengan ciri khas Kandri lalu kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah pertanian seperti daun kering, rating pohon, dll.

Dan sisanya produk berupa jasa seperti jasa rias pengantin. Bahan dan cara pembuatan berbeda- beda tergantung dari produk apa yang dihasilkan.

Pemasaran produk UMKM Asosiasi Mekarsari beberapa masih dipasarkan di sekitar wilayah Kandri seperti di pasar krempyeng, Expo, kunjungan wisatawan, dll beberapa di pasarkan di pusat kota Semarang bahkan ada juga yang sampai luar negeri lewat media sosial. Cara memperkenalkan produknya lewat teman, tetangga, perlombaan, tempat wisata, media sosial.

5.1.2 Proses Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari sebagai berikut:

UMKM Asosiasi Mekarsari mempersiapkan petugas pelaksana. Petugas pelaksana diambil dari Dinas Perindustrian, Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Semarang dan melakukan mitra kerja dengan perusahaan Bukalapak. Selain menyiapkan pelaksana program, pengelola juga melakukan persiapan lapangan antara lain, mempersiapkan lokasi dan peralatan yang dibutuhkan saat kegiatan berlangsung.

UMKM Asosiasi Mekarsari melakukan pengkajian terhadap anggota UMKM melalui Bapak Masduki selaku Ketua UMKM Asosiasi Mekarsari. Pengkajian dilakukan dengan cara diskusi bersama dengan anggota UMKM dalam merencanakan program saat pertemuan rutin.

Pengambil keputusan program pemberdayaan apa yang akan dilaksanakan melibatkan aparatur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, serta masyarakat yang tergabung dalam keanggotan UMKM Asosiasi Mekarsari.

Pelaksanaan program pemberdayaan yang akan dikaji adalah pelatihan tentang pemasaran dengan menggunakan teknologi digital, pengenalan e-commerce / bagaimana menjangkau konsumen era digital, cara bersaing usaha di e-commerce, pengemasan yang baik, pengambilan gambar untuk display produk, dll. Selain menghemat pengeluaran, pemasaran di internet dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat UMKM Asosiasi Mekarsari karena hanya membutuhkan jaringan internet dan gawai.

Selain itu, Pertemuan rutin tiga bulan sekali untuk program pemberdayaan masyarakat UMKM Asosiasi Mekarsari hanya sekedar program kerja, realisasi di lapangan masih belum tercapai secara optimal.

Evaluasi pemberdayaan masyarakat Asosiasi Mekarsari yaitu menggunakan evaluasi formatif yang dilakukan setiap kegiatan, setelah kegiatan dilaksanakan pemberdaya memberikan pengarahannya atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan biasanya berupa umpan balik atau tanya jawab.

Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari akan ditindaklanjuti, tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan cara menjual produk ke wisatawan maupun online atau diikutkan ke pameran dan dilombakan. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan warga lebih berdaya, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

5.1.3 Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari

Ilmu pengetahuan merupakan faktor penghambat dalam jalannya pemberdayaan, karena ada beberapa warga yang masih gagap teknologi untuk mengetahui tentang sistem berwirausaha modern yang lebih mudah dan efisien. Hal ini menyebabkan pemberdaya sulit untuk membuat anggota untuk berani berinovasi menyesuaikan perkembangan masa kini.

Produk hasil olahan dari UMKM Asosiasi Mekarsari seperti snack, keripik dll pemasarannya masih dalam lingkup kawasan Kandri yang terbilang lesu dan sepi jika tidak dibarengi dengan mencari mitra kerja ke daerah perkotaan yang jiwa konsumtifnya tinggi.

5.1.4 Faktor Pendukung dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM Asosiasi Mekarsari

Faktor yang mendukung dalam kegiatan pemberdayaan adalah dukungan sosial budaya seperti adat istiadat dan norma-norma di Desa Kandri, dukungan dari Pemerintah Kota Semarang melalui DISPERINDAG, Kerjasama dengan berbagai civitas akademika (UNNES, UNIKA, UNDIP) dan perusahaan swasta, sarana dan prasarana yang cukup memadai, sumber daya manusia yang memadai dan motivasi dari dalam diri seorang anggota maupun dari luar sangat diperlukan untuk membangunkan jiwa semangat anggota.

5.2 Saran

Saran peneliti menyangkut tahapan-tahapan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh UMKM Asosiasi Mekarsari dalam program meningkatkan kesejahteraan adalah :

5.2.1 UMKM Asosiasi Mekarsari lebih membuat program-program yang lebih bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun program-program yang telah berjalan dapat di maksimalkan dan juga lebih teratur dalam melakukan program pemberdayaan.

5.2.2 Pemerintah Kota Semarang dapat terus memberi dukungan pembinaan, dan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM Asosiasi Mekarsari dalam upaya menyejahtekakan warga Kandri

5.2.3 Bagi masyarakat di Desa Kandri lebih meningkatkan partisipasinya dan juga motivasi untuk mengikuti program- program yang diadakan oleh Asosiasi Mekarsari guna untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, Dave dan Richard Bromiley. 2013. Community empowerment: learning from practice in community regeneration. *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 26 Issue: 3, pp.190-202. Tersedia (online) <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2011-0105>. Diakses pada 20Maret 2018 pukul 10:51 WIB
- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: LP FEUI.
- Alfitri. 2011. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amalia, Alfi. 2011. Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pada UKM Batik Semarang
Dikota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Arief Rahmana. 2009. *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) Yogyakarta. ISSN: 1907-5022
- Arikunto, Suharsimi dan Cipi Safruddin Abdul Jabar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arsiyah., Haeru, R., Sumartono. 2009. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Wacana*. Vol. 12 No. 2.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 tentang Survei Angkatan Kerja Nasional
- Chatarina Rusmiyati. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS
- Christiani, C., Pratiwi, T., Bambang, M. 2011. Analisis Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah*.
- Desmawati, L., Rifai, A., & Mulyono, S. E. 2015. Penanggulangan Masyarakat Miskin Kota Rawan Kriminalitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur

Pendidikan Nonformal di Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education Semarang State University Volume 1 Number 1.*

Encyclopedia Of the Nations. Indonesia-Agriculture.(Online)
<http://www.nationsencyclopedia.com/asiaandoceania/indonesiaagriculture.html>.

Diakses pada 13 Maret 2018 pukul 13:18 WIB.

Fakhrudin dkk. (2010). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah. Semarang : Unnes Press.

Fatimah, Tjutju. 2011. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Ekonomi* Vol. IX No. 1.

Fattah, Luthfi. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Banjarbaru-Kalimantan Selatan: Pustaka Benua

Hadzigeorgiou, Yannis dan Roland M. Schulz. 2017. What Really Makes Secondary School Students "Want" to Study Physics?. *Journal Education Science*. 7 (84).
 Diakses pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 20:00 WIB.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika

Huraerah, Abu. 2011. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Kamil, M. 2012. Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi). Bandung: Alfabeta

Karsidi, Ravik. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan* Volume 2 Nomor 2. Institut Pertanian Bogor.

Maharani Ania. 2012. Pemberdayaan Masyarakat. *Artikel*. Jakarta: BKKBN

Mardikanto, T., Soebiato, P. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Mendiwelsobendek, Zoraida. (2015). *Community-Based Research: Enabling Civil Society's Self-Organisation*. *International Journal of Keybernetes University of Lincoln* Volume 44 Number 67

- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyono, Sungkowo Edy. 2015. Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Literasi Berbasis Kewirausahaan Usaha Mandiri Melalui PKBM Di Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education*, Vol 1, No.1. Universitas Negeri Semarang.
- Mulyono, Sungkowo Edy. *Non Formal Untuk Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin*. (Online). Disertasi, Universitas Diponegoro. Diakses pada 29 Juli 2018 pukul 18.30 WIB.
- Nasdian, Tonny Fredian. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia.
- Oktarina, Nina., Joko Widodo., Fachrurrozie.2019.Penguatan UMKM Melalui Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Jangkauan Pemasaran di Kecamatan Toroh Purwodadi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 23 No.2. Universitas Negeri Semarang.
- Partomo, Tiktik S., Abdullah, R.S. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Prijono dan A.M,W Pranarka (eds). 1996. *Pemberdayaan: konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: CSIS
- Purnomo, Margo. 2011. Adopsi Tekonologi Oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2, No.2. Universitas Negeri Semarang.
- Rahim, Firmansyah. 2012. *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Rifa'i, Achmad. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal*. Semarang: Unnes Press.
- Saadah, Nylatus. 2014. Analisis Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi* Vol. 2 No. 1.

- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial : Seketsa Teori dan Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana.
- Setiadi, Budiarmo Eko, Rusiyanto. 2008. Pengaruh Sarana dan Prasarana Belajar Terhadap Hasil Belajar Pelajaran Alat Ukur. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin* Vol. 8 No. 2.
- Sharma, Ms. Rajnil. 2016. Employee Empowerment In Global Scenario: An Empiricle Study. Vol 2 Issue April March 2016 Paper 1 ISSN: 2455-6661
- Sintaasih, Desak Ketut, dkk. 2013. Peran Pemberdayaan Dalam Menopang Kreativitas Sumber Daya Manusia Sebagai Sumber Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi*. Vol. IX No. 2.
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sucipto, N. R., Sutarto, J. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Melalui Kursus Menjahit di LKP Elisa Tegal. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 4 (2). Universitas Negeri Semarang.
- Sudarno. 2011. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Depok. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2 No. 2.
- Sudjana, Nana. 2011. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharmanto, Agus., Suwahyo., Sunyoto. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Mesin Perontok Padi (*Power Thresher*) Bagi Petani Di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan. *Rekayasa* Vol. 14 No. 2. Universitas Negeri Semarang.

- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2010. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Sulistiyastuti, Dyah Ratih. 2004. *Dinamika Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM Di Indonesia 1999-2001*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 2 : 143 – 164. Center for Entrepreneurship and Policy Analysis (CEPA) Yogyakarta.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Suparjan & Hempri S. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sutarto, Joko., Sungkowo Edy., dkk. 2018. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Vol. 35 No.1. Universitas Negeri Semarang.
- Sutarto, Joko. 2007. Pendidikan Nonformal Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, & Pemberdayaan Masyarakat. Semarang: Unnes Press.
- Tomey, Anne H. (2009). *Empowerment and Disempowerment in Community Development Practice: Eight Roles Practitioners Play*. *International Journal of Community Development Oxford University Volume 46 Number 2*.
- Totok dan Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Triani, N., Hartuti, P., Dyah, H. 2011. Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Tulus T.H Tambunan. 2009. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Pengertian UMKM
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang No.20 Pasal 6 Tahun 2008 tentang Kriteria UMKM

Widiasih, Eka., Tri Suminar. 2015. Monitoring Dan Evaluasi Program Pelatihan Batik Brebesan (Studi Di Mitra Batik Desa Bentar Kabupaten Brebes). *Journal of Nonformal Education*, Vol 1, No.1. Universitas Negeri Semarang.

World Population Data Sheet. 2013. *Kependudukan*. Online <http://www.prb.org> Diakses pada 10 April 2018 pukul 21.30 WIB

Wuryani, Emy dan Wahyu Purwiyastuti. 2012. Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Kebudayaan Dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Dusun Ceto. *Satya Widya*, Vol. 28, No.2. Universitas Kristen Satya Wacana.

Yulong, Li dan Caroline Hunter. 2015. "Community involvement for sustainable heritage tourism: a conceptual model", *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, Vol. 5 Issue: 3, pp.248-262. Tersedia (online) <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-0027>. Diakses pada 21 Juli 2018 pukul 10:18 WIB.

Zaenudin, M. Ali. 2013. Pemberdayaan Buruh Tani Melalui Program Desa Vokasi (Studi Kasus Kewirausahaan Peternakan dan Penggemukan Kambing di Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*. Vol. 2, No. 2. Universitas Negeri Semarang

Zimmerman, J. 1995: *Empowerment. The politics of an alternative development*. Oxford: Basil Blackwell. xii+196 pp. ISBN: 1 557 86300 8. Diakses pada 21 Juli 2018 pukul 11:25 WIB.